

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

Sekretariat Jenderal

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



LAPORAN KINERJA

Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja (LKj) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2021 dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, telah diberikan arahan kepada semua instansi untuk mempersiapkan pelaporan kinerja, maka Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara menyusun Laporan Kinerja (LKj) tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan laporan akhir tahun yang menyajikan capaian kinerja dan anggaran serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara sepanjang tahun 2021 mengacu pada Perjanjian Kinerja 2021, Rencana Strategis 2020-2024 dan Rencana Kerja tahun 2021. Pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021.

Kiranya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat khusus bagi pejabat dan staf pada unit kerja P3E Bali dan Nusa Tenggara serta Pihak terkait guna kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.



Januari 2022

Ni Nyoman Santi, S.T.,M.Sc
NIP. 19720617 199803 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Data Umum Organisasi	2
1.2. Permasalahan Utama dan Strategi dalam Pelaksanaan Tupoksi	3
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Sumber Daya Manusia	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Renstra 2020-2024	11
2.2. Renja Tahun 2021	18
2.3. Perjanjian Kinerja 2021	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja	22
3.2. Capaian Indikator Kinerja Komponen Kegiatan	38
3.3. Kinerja Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	48
4.1. Kesimpulan	49
4.2. Tindak Lanjut	50
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

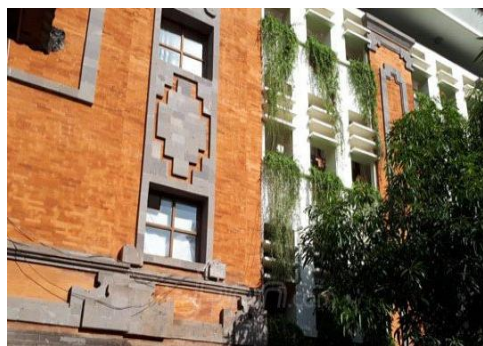
Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan P3E Bali Nusra 2020 – 2024	11
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Komponen Kegiatan P3E bli Nusra 2020-2024	13
Table 3. rencana Kerja (Renja) Tahun 2021	18
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Satker P3E Bali Nusra	20
Tabel 5. Output dan outcome Indikator Kinerja Kegiatan P3E bali Nusra	36
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Komponen Kegiatan P3E Bali Nusra 2021	38
Tabel 7. Rekapitan realisasi anggaran pada satker P3E Bali Nusra	44



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Data Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan



konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutandan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan pertimbangan dalam tugas tersebut, maka dibentuklah Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) di enam (6) wilayah Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, P3E Bali dan Nusa Tenggara, yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan pendendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion yang meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Adapun fungsi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan ekoregion;
2. Pelaksanaan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;
3. Pelaksanaan perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion
4. Pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion; dan
5. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat

1.2 Permasalahan Utama (*strategic issued*)

Pandemi Covid – 19

Pada bulan Januari 2021, COVID-19 masih menjadi ancaman bagi dunia maupun Indonesia. Dalam waktu 3 bulan (November 2020 – Januari 2021) terjadi penambahan 50 juta kasus di dunia, hal ini melebihi 50 juta jumlah kasus pertama yang terjadi dalam 10 bulan (Januari 2020 – Oktober 2020). Pada masa itu telah dilaksanakan vaksinasi global pada 55 negara. Sementara itu, perkembangan COVID-19 di Indonesia juga mencapai akumulasi kasus melewati 1 juta kasus pada tanggal 26 Januari 2021.



Perkembangan kasus tersebut menjadi ancaman bagi perekonomian nasional serta pada fasilitas dan tenaga layanan kesehatan di Indonesia.

Pada awal tahun 2021, sebagai respon terhadap pandemi, Bapak Presiden Jokowi menyampaikan arahan dalam rangka kegiatan tahun 2021 terutama penanganan pandemi COVID-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi. Pada waktu tersebut arahan, Presiden dalam menangani pandemi yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi. Menutup tahun 2021 pemerintah berhasil menyuntikan 280 juta dosis vaksin COVID-19, dengan rincian dosis 1 mencapai 165,2 juta dosis, dosis 2 mencapai 113,8 juta dosis, dan dosis 3 mencapai 1,3 juta dosis. Selanjutnya, dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional, maka perlu dilakukan langkah strategis berupa refocusing dan realokasi belanja K/L TA. 2021.

Penghematan Tahap I

Menteri Keuangan melalui surat Nomor. No. S. 30/MK.02/2021, tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan pagu penghematan sebesar Rp. 519.387.525.000,- dengan catatan penghematan dilaksanakan pada belanja barang dan belanja modal non operasional dari sumber dana rupiah murni. Pada penghematan tahap I ini, Unit Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara mendapat alokasi sebesar Rp 15.027.517.000,- Penghematan pada tahap I ini, pada Unit Kerja Pusat Pengendalian pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara secara kinerja tidak mengalami perubahan. Hal tersebut disebabkan karena penghematan dilakukan pada efisiensi belanja kegiatan yang tidak berdampak langsung pada kinerja.

Penghematan Tahap II

Melalui surat Menteri Keuangan Nomor No. S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2021. Surat tersebut kembali me -refocusing anggaran belanja K/L TA 2021 dalam rangka menjaga defisit APBN TA. 2021 sesuai dengan proyeksi agar tercipta APBN yang prudent dan sustainable. Sumber penghematan belanja berasal dari Rupiah Murni dan Non Rupiah Murni (BLU) sepanjang alokasinya diperuntukan bagi pembayaran komponen tunjangan kinerja THR dan Gaji ke-13. Pada penghematan tahap II ini, Unit Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara tetap mendapat alokasi sebesar Rp 15.027.517.000,- .

Pada tanggal 19 Maret 2021, telah terjadi kebakaran di kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara yang mengakibatkan rusaknya barang milik negara dan bagian – bagian bangunan gedung lantai 2 dengan kerugian material senilai Rp. 630.639.400,-. Dalam rangka renovasi gedung dan belanja modal untuk operasional kantor maka P3E Bali Nusra mendapatkan alokasi Anggaran sebesar Rp. 850.000.000,- . Sehingga, alokasi ini merubah pagu anggaran P3E Bali Nusra menjadi Rp. 15.877.517,000,- dan tidak terjadi perubahan kinerja pada Pusat Pengendalian pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara.

Penghematan Tahap III

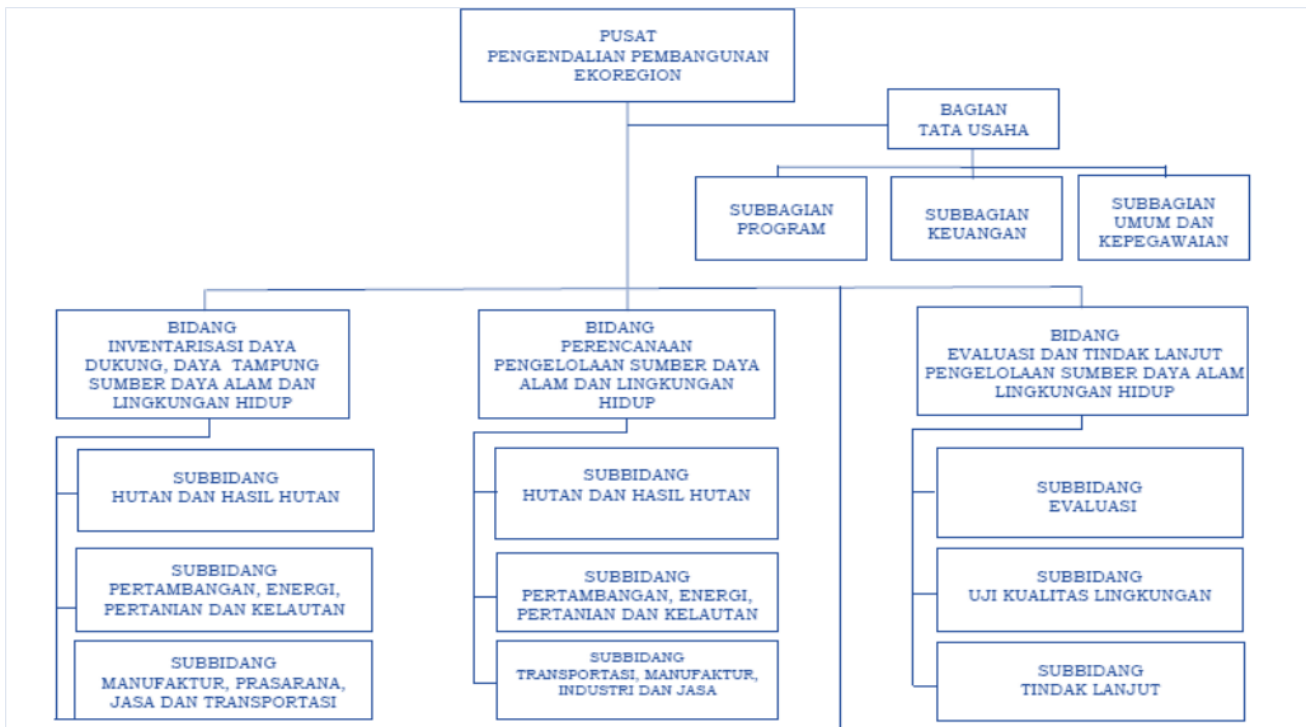
Pada tanggal 1 Juli 2021 pemerintah mengumumkan pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) dan Level. Hal ini dilakukan untuk mengatasi dampak Coronavirus Disease (COVID)-19 khususnya varian Delta. Mengatasi serangan gelombang ke dua dari COVID-19 ini, pemerintah menindaklanjutinya dengan mengambil langkah strategis berupa refocusing dan realokasi belanja K/L Tahun Anggaran 2021. Langkah tersebut diambil untuk mendanai penanganan COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan serta dukungan anggaran perlindungan masyarakat.

Menteri Keuangan kembali mengeluarkan surat Nomor : S-584/MK.02/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 bahwa KLHK mendapatkan pagu penghematan tahap III sebesar Rp. 598.062.436.000,-. Dalam melakukan penghematan ini, KLHK tetap berupaya menjaga kinerja lingkungan hidup dan kehutanan. Penghematan Tahap III ini, Unit Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara mendapatkan penghematan sebesar Rp. 415.905.000,- dari pagu eksisting sebesar Rp. 15.877.517.000,- menjadi Rp.15.461.612.000,-

Penghematan Tahap IV

Penghematan Tahap IV ini adalah untuk menindaklanjuti Rapat Terbatas Kabinet tanggal 19 Juli 2021 dengan agenda Penanganan Pandemi Covid-19 (Evaluasi PPKM Darurat). Pemerintah masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar 55,21 triliun dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipenuhi dari refocusing dan realokasi kembali belanja K/L 2021. Sumber refocusing belanja berasal dari Rupiah Murni (RM). Jenis Belanja yang dapat dilakukan refocusing adalah Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai. Unit Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara mendapatkan pagu alokasi penghematan sebesar Rp. 612.835.000,- dari pagu tahun 2021 setelah penghematan Tahap III sebesar Rp. 15.461.612.000,- menjadi Rp. 14.848.777.000,-

1.3 Struktur Organisasi P3E Bali & Nusra



Adapun struktur organisasi Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara terdiri dari 4 (empat) bagian/bidang dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

Bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) sub Bagian yang meliputi:

a. Subbagian Program

Memiliki tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.

b. Subbagian Keuangan

Memiliki tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Memiliki tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian dan hubungan masyarakat.

2. Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Memiliki tugas melaksanakan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion. Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas 3 (tiga) sub bidang :

a. Subbidang Hutan dan Hasil

Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya hutan dan hasil hutan

b. Subbidang Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan

mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya pertambangan, energi, pertanian dan kelautan.

c. Subbidang Transportasi, Manufaktur, Industri dan Jasa

mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya transportasi, manufaktur, industri dan jasa.



3. Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan penerapan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas 3 (tiga) sub bidang :

a. Subbidang Hutan dan Hasil Hutan

mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana dan penerapan pengelolaan hutan dan hasil hutan.

- b. **Subbidang Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan** mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana dan penerapan rencana pengelolaan sumber daya pertambangan, energi, pertanian dan kelautan.
- c. **Subbidang Transportasi, Manufaktur, Industri dan Jasa** mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana dan penerapan rencana pengelolaan sumber daya pengelolaan transportasi, manufaktur, industri dan jasa.

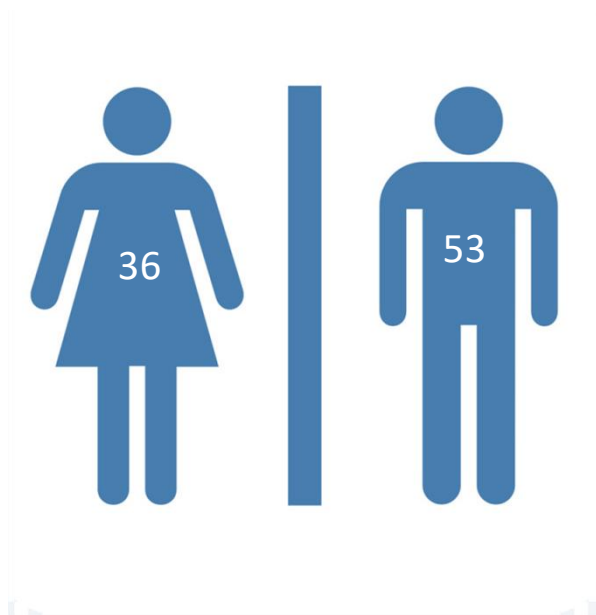
4. Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi, uji kualitas lingkungan, dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion. Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas 3 (tiga) sub bidang :



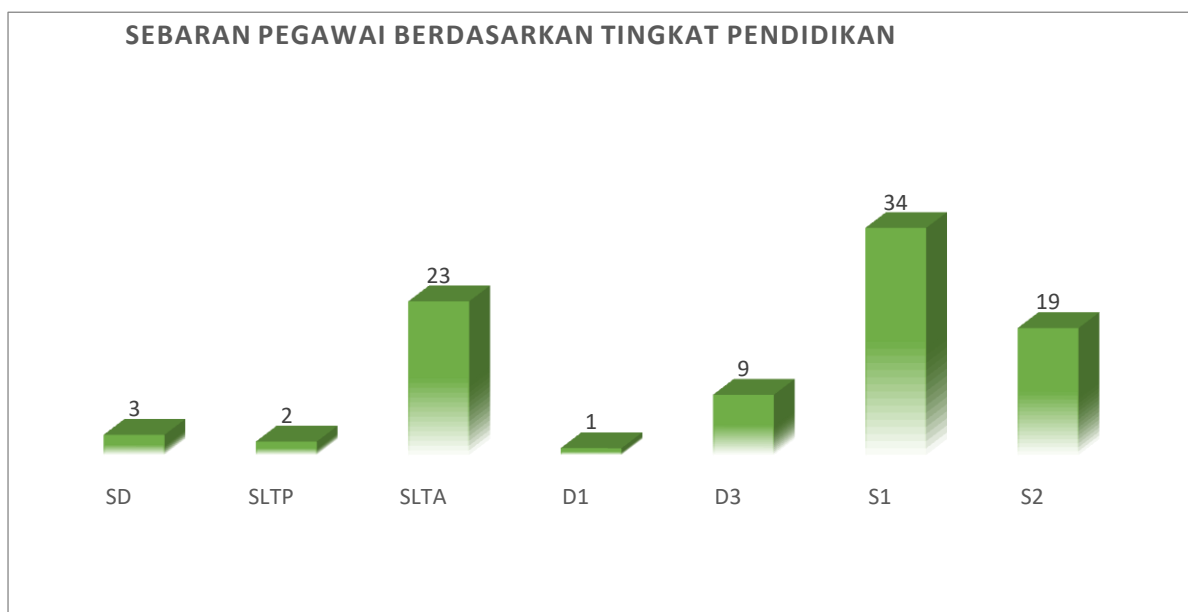
- a. **Subbidang Evaluasi** mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. **Subbidang Uji Kualitas Lingkungan** mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan uji kualitas lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- c. **Subbidang Tindak Lanjut** mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

1.4 Sumber Daya Manusia



Sumber Daya Manusia Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2021 memiliki 89 orang pegawai yang kompeten dan profesional. Sumber Daya Manusia ini terdiri dari 55 orang pegawai ASN, 21 orang pegawai PPNPN (Simpeg) dan 13 orang PPNPN (Non Simpeg). Sumber daya manusia ini menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

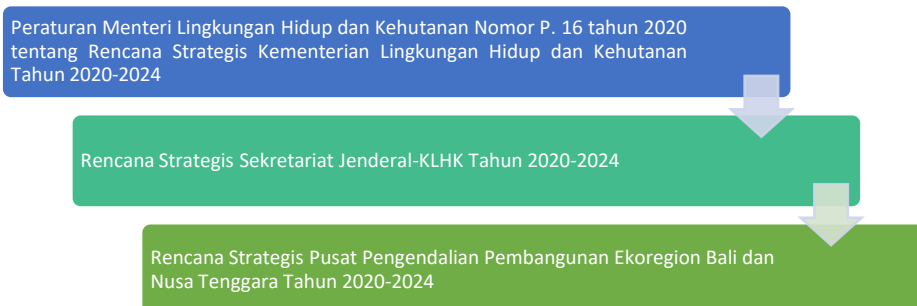
Pegawai pada kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2021 terdiri dari 53 orang laki – laki dan 36 orang perempuan. Pegawai PNS terdiri dari 31 laki – laki dan 24 perempuan, sementara PPNPN (simpeg dan non-simpeg) terdiri atas 33 laki – laki dan 12 orang perempuan. Adapun sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada grafik berikut:



A white egret stands on the edge of a red boat, which is secured with blue ropes. The background is a dense wall of green, leafy plants. The text 'BAB II PERENCANAAN KINERJA' is overlaid in white, serif font on a semi-transparent dark grey rectangular background.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024



Renstra eselon 2 / satker mandiri menyusun “Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Indikator Komponen Kegiatan P3E Bali Nusra” yang didalamnya termuat kegiatan/komponen kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan target indikator kinerja tahun 2020-2024.

2.1.1 Target Indikator Kinerja Kegiatan P3E Bali dan Nusa Tenggara

Target kegiatan ditetapkan untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan. Sasaran kegiatan menggambarkan kondisi yang harus dicapai dalam kurun waktu 2020-2024. Target indikator kinerja kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nus Tenggara dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan P3E Bali & Nusra 2020-2024 (sesuai dengan PermenLHK Nomor P. 18 Tahun 2015)

Kegiatan/ Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengendalian Pembangunan LHK Regional						
Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Bali dan Nusra	a. Inventarisasi dan Perhitungan DDDTLH di Wilayah Ekoregion Bali dan Nus Tenggara	1 Dokumen	2 Dokumen	*	*	*
	b. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	1 Dokumen	2 Dokumen	*	*	*
	c. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	1 Dokumen	1 Dokumen	*	*	*
	d. Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan P3E Bali&Nusra	4 Poin	4 Poin	*	*	*

Keterangan :

* = Target Sesuai dengan IKK Tusi PermenLHK Nomor P.15 tahun 2020

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan P3E Bali & Nusra 2020-2024 (sesuai dengan PermenLHK Nomor P. 15 Tahun 2020)

Kegiatan/ Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengendalian Pembangunan LHK Regional						
Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Bali dan Nusra	Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	*	*	8 Pemda	8 Pemda	8 Pemda
	Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	*	*	8 Pemda	8 Pemda	8 Pemda
	Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	*	*	8 Pemda	8 Pemda	8 Pemda
	Tingkat Kepuasan Publin Terhadap Layanan P3E	*	*	4 Poin	4 Poin	4 Poin

Keterangan :

* = Target Sesuai dengan IKK Tusi PermenLHK Nomor P.18 tahun 2015

2.1.2 Target Indikator Kinerja Komponen Kegiatan P3E BaliNusra

Target indikator kinerja komponen kegiatan yang ditetapkan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, bertujuan untuk pengukuran ketercapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Sasaran komponen kegiatan menggambarkan kondisi yang harus dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 di wilayah ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Sasaran dan indikator kinerja komponen kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Komponen Kegiatan Pusat Pengendalian Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara 2020-2024

No	Output dan Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Satuan	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
I. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah									
1.	Pelaksanaan Inventarisasi SDALH dan Perhitungan DDDT di Wilayah Ekoregion BaliNusra	Terinventarisasi dan terhitungnya Daya Dukung dan Daya Tampung SDALH di wilayah ekoregion BaliNusra	Jumlah dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung SDALH di ekoregion Balinusra	Dokumen	1	2	*	*	*
2.	Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan inventarisasi dan perhitungan DDDT SDALH di Ekoregion Bali dan Nusra	Terfasilitasinya pemerintah daerah dalam penyusunan DDDT SDALH di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Pemerintah Daerah yang menyusun DDDT SDALH	Pemda	3	3	*	*	*
3.	Penyusunan rencana pengelolaan SDALH diEkoregion BaliNusra	Tersusunya rencana pengelolaan SDALH di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah rencana pengelolaan SDALH di ekoregion BaliNusra	Dokumen	1	2	*	*	*

No	Output dan Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Satuan	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
4.	Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusra	Terlaksananya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Pemerintah Daerah yang menyusun perencanaan pembangunan (RPPLH dan KLHS) berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusra	Pemda	3	3	*	*	*
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra	Terlaksananya pengumpulan dan analisis data informasi bahan evaluasi pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra	Data dan informasi pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra	Dokumen	1	1	*	*	*
6.	Pemantauan kualitas lingkungan	Terlaksananya pemantauan kualitas Ekoregion BaliNusra	Jumlah lokasi yang dipantau	Dokumen	1	1	*	*	*
7.	Tindak lanjut hasil evaluasi	Terlaksannannya tindak lanjut pengelolaan SDA dan LH di ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah hasil evaluasi yang ditindak lanjuti dalam pengelolaan SDALH	Dokumen	1	1	*	*	*
8.	Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan P3E BaliNusra	Terlaksananya survei tingkat kepuasan layanan terhadap kegiatan P3E BaliNusra	Adanya data hasil survei tingkat kepuasan layanan terhadap kegiatan P3E BaliNusra	Poin	4	4	4	4	4

II. Layanan Dukungan Manajemen Satker

No	Output dan Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Satuan	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi program dan anggaran di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Dokumen RENSTRA P3E Bali & Nusra 2020-2024	Dokumen	1	1	n/a	n/a	n/a
			Jumlah Dokumen RENJA	Dokumen	1	1	1	1	1
			Jumlah Dokumen TOR dan RKAKL	Dokumen	1	1	1	1	1
			Jumlah Dokumen KRISNA	Dokumen	1	1	1	1	1
			Jumlah Laporan LKj	Dokumen	1	1	1	1	1
			Jumlah Laporan Triwulan P39 Bapenas	Laporan	4	4	4	4	4
			Jumlah Laporan Bulanan RKA	Laporan	12	12	12	12	12
			Jumlah Laporan RKA	Laporan	12	12	12	12	12
2.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan DBH DR, DAK dan kegiatan lainnya	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan DBH DR, dan DAK LHK	Laporan	2	2	2	2	2
3.	Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien	Jumlah laporan keuangan	Laporan	2	2	2	2	2
4.	Pengelolaan Kepegawaian	Terlaksananya peningkatan pengelolaan kepegawaian dilingkup P3E BaliNusra	Jumlah laporan kepegawaian	Laporan	12	12	12	12	12
5.	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Terlaksananya penataan layanan umum & perlengkapan	Jumlah laporan BMN	Laporan	2	2	2	2	2
			Jumlah laporan kehumasan	Laporan	1	1	1	1	1

No	Output dan Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Satuan	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
Layanan Sarana Internal									
2.	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Terlaksananya pengadaan peralatan dan fasilitas perkaontoran	Jumlah unit peralatan dan fasilitas perkantoran	Unit	27	41	15	15	15
Layanan Perkantoran									
1.	Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Terlaksana kelancaran pembayaran gaji dan tunjang	Terbayarnya gaji dan tunjangan	Layanan	1	1	1	1	1
2.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatnya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terlaksananya operasional perkantoran (PDAM, Tlp, Listrik, ATK dan lainnya).	Layanan	1	1	1	1	1
			Terlaksananya pemeliharaan perkantoran (komputer, AC, taman, kendaraan, dan lainnya)	Layanan	1	1	1	1	1

Keterangan:

n/a = Tidak Ada

* = Target disesuaikan dengan IKK Tusi PermenLHK Nomor P. 15 tahun 2020

2.1.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoreion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Kerangka pendanaan ini disusun melalui proses kalkulasi bersama dan tabulasi menggunakan aplikasi KRISNA. Proyeksi kebutuhan anggaran Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara- Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 sebesar Rp. 92.750.539.000,- dengan rincian selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 2. Alokasi Anggaran TA. 2020 -2024 P3E Bali dan Nusa Tenggara KLHK

No	Kegiatan/Output Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp. Miliar)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pengendalian Pembangunan LHK Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	15.192.308.000	16.711.535.000	18.382.688.000	20.220.956.000	22.243.052.000
1	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	2.704.947.000	2.975.440.000	3.362.9983.000	3.500.281.000	3.960.129.000
2	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1.573.687.000	1.731.055.000	1.904.160.000	2.094.576.000	2.304.034.000
3	Layanan Sarana Internal	471.366.000	518.502.000	570.372.000	627.409.000	65.000.000
4	Layanan Perkantoran	10.442.308.000	11.486.538.000	12.635.191.000	13.898.710.000	15.228.582.000

Pagu Anggaran P3E Bali Nusra tahun 2021 senilai Rp. 15.027.517,- . Akibat adanya pandemi Covid 19 pemerintah menetapkan *refocusing* anggaran untuk Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sehingga pagu anggaran Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara tahun 2021 pasca *refocusing* I s/d IV dan untuk renovasi pasca kebaran adalah senilai **Rp. 14.848.777.000,-** .

2.2 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021

Sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, maka disusunlah Rencana kerja tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara 2020-2024. Adapun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 3. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Komponen Kegiatan	Satuan	Target	Alokasi Anggaran
Kegiatan: Pengendalian pembangunan LHK Regional				15.848.777.000,-
Sasaran Kegiatan: Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Bali dan Nusra				
	<i>1. Inventarisasi dan Perhitungan DDDTLH di Wilayah Ekoregion Bali dan Nusra</i>	Dokumen	2	
	<i>2. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara</i>	Dokumen	2	
	<i>3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK</i>	Dokumen	1	
	<i>4. Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan P3E BaliNusra</i>	Poin	4	
	Output 1: Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Pemda	41	2.608.909.000,-
	<i>1. Inventarisasi dan Perhitungan DDDTLH di Wilayah Ekoregion Bali dan Nus Tenggara</i>	Dokumen	2	800.000.000,-
	<i>2. Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan inventarisasi dan perhitungan DDDT SDALH di Ekoregion Bali dan Nusra</i>	Pemda	3	135.360.000,-
	<i>3. Penyusunan rencana pengelolaan SDALH di Ekoregion Bali dan Nusra</i>	Dokumen	2	873.266.000,-
	<i>4. Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusra</i>	Pemda	3	60.434.000,-
	<i>5. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra</i>	Dokumen	1	266.000.000,-

	<i>6. Pemantauan kualitas lingkungan</i>	Laporan	1	221.999.000,-
	<i>7. Tindak lanjut hasil evaluasi</i>	Dokumen	1	302.000.000,-
	<i>8. Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan P3E BaliNusra</i>	Poin	4	
	Output 2: Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	5	914.795.000,-
	<i>1. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran</i>	Dokumen/laporan	9	176.740.000,-
	<i>2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</i>	Dokumen/laporan	2	88.202.000,-
	<i>3. Pengelolaan Keuangan</i>	Dokumen/laporan	2	168.592.000,-
	<i>4. Pengelolaan Kepegawaian</i>	Dokumen/laporan	12	160.428.000,-
	<i>5. Pelayanan Umum dan Perlengkapan</i>	Dokumen/laporan	5	320.833.000,-
	<i>6. Diseminasi Kegiatan P3E Bali Nusra di Provinsi Bali, NTB dan NTT</i>	Dokumen/Laporan	1	192.193.000,-
	<i>7. Pengarusutamaan Gender</i>	Laporan	1	20.300.000,-
	Output 3: Layanan Sarana Internal P3E Bali Nusra	Unit	41	1.199.740.000,-
	<i>1. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran</i>	Unit	41	1.199.740.000,-
	Output 4: Layanan Perkantoran	Layanan	2	10.342.182.000,-
	<i>1. Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan</i>	Layanan	1	6.256.572.000,-
	<i>2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran</i>	Layanan	1	4.085.610.000,-

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Satker Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusra.

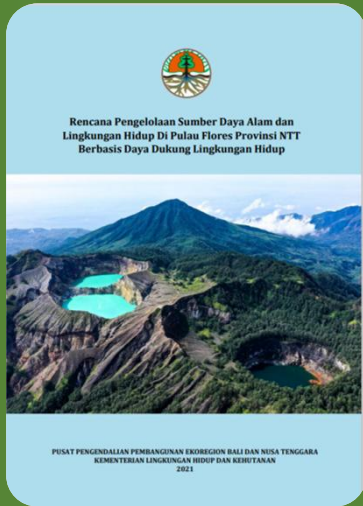
Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengendalian Ekoregion Bali-Nusa Tenggara	01-Terkendalinya Pembangunan LH dan Kehutanan di Setiap Ekoregion	01. Hasil Inventarisasi dan Perhitungan DDDT LH di Wilayah Ekoregion	2	Dokumen
		02. Rencana Pengelolaan SDA LH di Wilayah Ekoregion	2	Dokumen
		03. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	1	Dokumen
		04. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	4	Poin

(dalam ribuan rupiah)

P3E Bali dan Nusa Tenggara

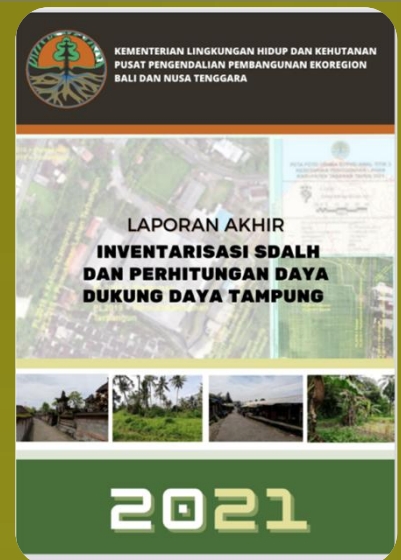
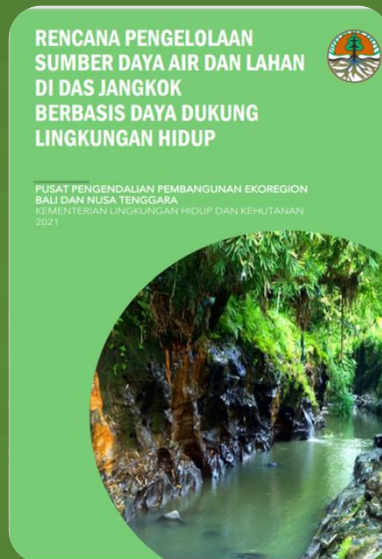
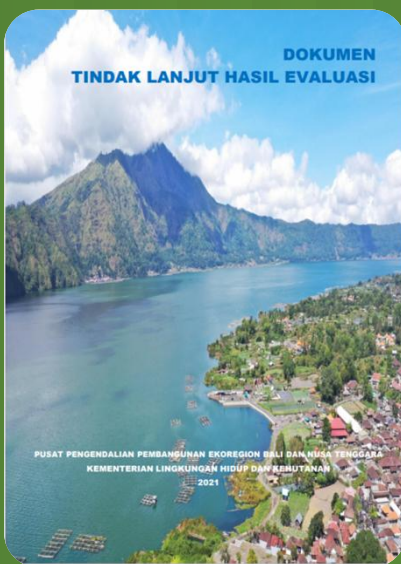
14.848.777,-

1. Gaji dan Tunjangan Pegawai P3E Bali Nusra	6.256.572,-
2. Layanan Operasional dan Pemeliharaan P3E Bali Nusra	4.085.610,-
3. Layanan dukungan manajemen satuan kerja P3E Bali	914.795,-
4. Layanan Sarana Internal P3E Bali-Nusra	1.199.740,-
5. Layanan Prasarana Internal P3E Bali Nusra	0
6. Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Balinusra	2.392.060,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

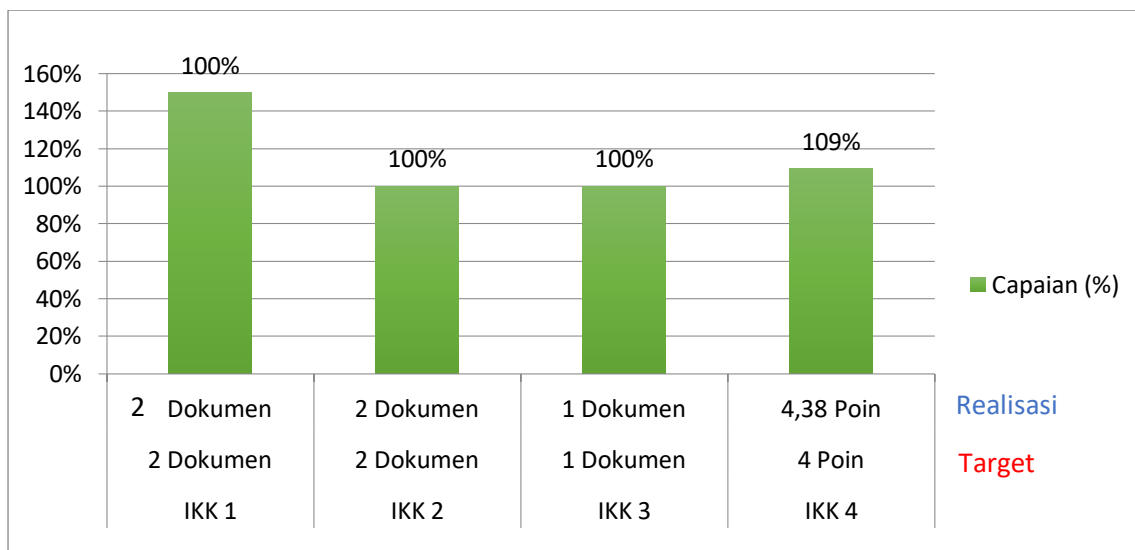


3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja P3E Bali dan Nusa Tenggara tahun 2021 dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari input, output dan satuan masing-masing indikator kinerja. Indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan P3E Bali dan Nusa Tenggara – KLHK TA. 2021 berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Untuk melakukan pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja (LKj) ini

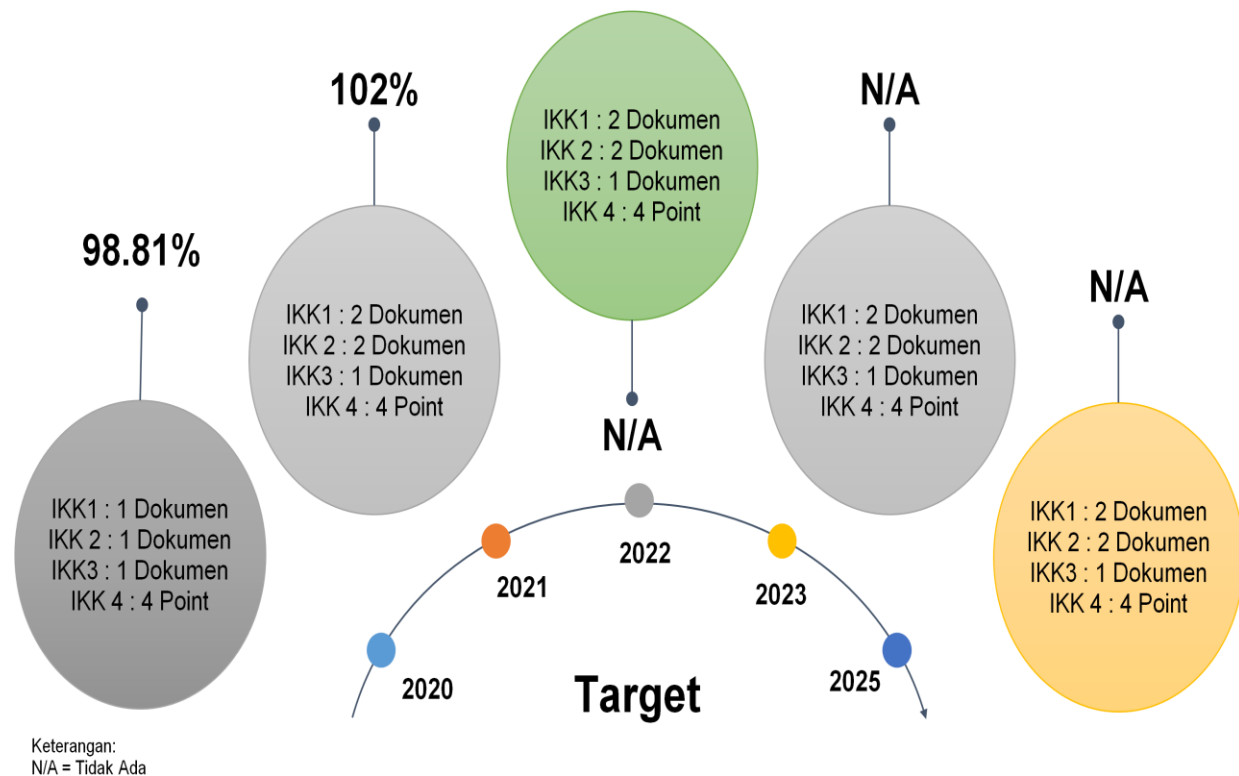
digunakan metode Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yaitu cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga akan diketahui ada atau tidak ada perbedaan capaian sasaran dengan target yang diharapkan. Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan itu dianalisis guna mengetahui penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja yang kemudian digunakan untuk menetapkan strategi peningkatan kinerja di masa mendatang.

3.1.1 Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2021



Pada Tahun 2021, target kinerja P3E Bali dan Nusa Tenggara tidak mengalami perubahan ditengah kondisi Pandemi Covid – 19 dan adanya refocusing anggaran I – IV. Capaian Kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2021 secara keseluruhan adalah 102% meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 98,81%.

3.1.2 Perbandingan Target Tahun 2020 -2024 dengan Realisasi Sampai dengan Tahun 2021



Jika dibandingkan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan, progres capaian kinerja P3E Bali dan Nusa Tenggara dapat dilihat pada gambar diatas. Jumlah dokumen Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah Ekoregion yang dihasilkan hingga 2021 sejumlah 3 dokumen yaitu 33% dari target 5 tahunan, Dokumen Rencana Pengelolaan SDALH sejumlah 3 dokumen yaitu 33% dari target, Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Strategis LHK dan Penerapan Program Strategis LHK sejumlah 2 Dokumen yaitu (40%) dari target 5 tahunan serta hasil kepuasan publik terhadap layanan P3E senilai 4,38 poin (109,5%).

IKK	Realisasi Hingga 2021	Capaian (%)
IKK 1	3 Dokumen	33%
IKK 2	3 Dokumen	33%
IKK 3	2 Dokumen	40%
IKK 4	4,38 Poin	109.5%

IKK 1: HASIL INVENTARISASI DAN PERHITUNGAN DDDTLH DI WILAYAH EKOREGION

Komponen kegiatan dalam Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Inventarisasi dan Perhitungan DDDT LH di Wilayah Ekoregion yaitu:

1. Inventarisasi SDALH dan Perhitungan DDDT di Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara.

Inventarisasi SDALH dan Perhitungan DDDT yang dilaksanakan oleh P3E Bali dan Nusa Tenggara pada 2 Lokasi yaitu di Pulau Bali (Status Daya Dukung Air Pulau Bali) serta di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemutakhiran Daya Dukung Wisata Taman Nasional Tambora) dengan dokumen sebagai berikut:

A. Status Daya Dukung Air Pulau Bali:

Berdasarkan potensi sumber yang telah dijabarkan dan proyeksi kebutuhan air bersih hingga tahun 2025, maka diberikan rekomendasi yang sesuai untuk dapat memenuhi kebutuhan air pada wilayah – wilayah dengan defisit penyediaan air. Berdasarkan infrastruktur SPABnya Pulau Bali diproyeksikan akan mengalami kekurangan air bersih (untuk air minum dan industri) sejumlah 1051,91 liter/detik pada tahun 2025. Sementara itu jika dilihat berdasarkan potensi air dari ekosistem alaminya, Pulau Bali masih memiliki cadangan air sebesar 46,189.0 liter/detik. Berdasarkan pertimbangan keseimbangan nilai manfaat dan resiko terhadap ekosistem alaminya sumber air baku yang bisa dimanfaatkan beserta pembangunannya di tahun 2025 memiliki kapasitas 14.937,0 liter/detik



B. Pemutakhiran Dokumen DDDT TN Tambora (Jalur Pendakian Doro Ncanga dan Doropeti):

- a. Kemampuan jalur wisata Doro Ncanga dalam mendukung kegiatan di atasnya adalah sebagai berikut: Doroncanga Berkendara Roda 4 (118 – 173); (2) Doroncanga Berkendara Roda 2 (137 – 202); Doroncangan jalur mendaki (30 – 44) Doroncanga Puncak (7 - 10 per gelombang).
- b. kemampuan jalur wisata Doropeti dalam mendukung kegiatan di atasnya adalah sebagai berikut: Jumlah Doropeti (281 – 413) Doropeti Puncak (9 - 13 per gelombang).

- c. Jika dalam situasi khusus (incidental) terdapat event khusus, dimana pengunjung kedua jalur Doro Ncanga dan jalur Doropeti melebihi dari daya dukung yang dipersyaratkan, maka wisatawan yang dapat didukung kawasan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, namun mengorbankan kenyamanan dan keindahan di sekitar jalur wisata, adalah sebagai berikut;
- d. Daya dukung wisata area sanctuary rusa eksisting (area A – E) adalah sebesar 319 – 469 orang / gelombang.
- e. Daya dukung wisata area sanctuary rusa yang dapat dikembangkan (semua area) adalah sebesar 603 – 887 orang / gelombang.

2. Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Inventarisasi dan Perhitungan DDDT SDALH di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara.



Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Dokumen DDDTLH, KLHS, Dan RPPLH merupakan kegiatan untuk dapat memberikan asistensi dan bimbingan kepada pemerintah daerah yang membutuhkan dalam melakukan penyusunan dokumen dan perhitungan daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup beserta peta indikatifnya, penyusunan dokumen KLHD dan RPPLH yang sedianya akan disusun oleh pemerintah daerah. Sebelum adanya pemotongan anggaran akibat pandemi covid-19, rencana kegiatan berupa pertemuan dengan instansi penyusun dokumen DDDTLH, KLH, dan RPPLH. Tetapi akibat adanya kondisi luar biasa yang menyebabkan pemotongan anggaran, kegiatan ini menjadi bersifat pasif, dimana kegiatan dilaksanakan apabila ada surat permohonan dari pemerintah daerah untuk membantu mereka dalam menyusun dokumen DDDT, KLHS ataupun RPPLH. Kegiatan dilakukan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan DLH Kabupaten Badung
- b. Menghadiri Undangan Dalam Rangka Inventarisasi dan Perhitungan DDDT di Kabupaten Buleleng
- c. Menghadiri Rapat Forum Konsultasi Publik II KLHS RPJMD Kabupaten Jembrana

- d. Menghadiri Rapat Forum Konsultasi Publik II KLHS RTRW Kabupaten Jembrana
- e. Menghadiri Rapat Pembahasan Naskah Akademik RPPLH Kabupaten Jembrana.
- f. Menghadiri Undangan Pemaparan Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Terhadap Rencana Pembangunan Bandara

Analisis Capaian Kinerja

Pada indikator kinerja "Hasil Inventarisasi dan Perhitungan DDDT LH di Wilayah Ekoregion", berdasarkan hasil inventarisasi dan perhitungan DDDT LH di wilayah ekoregion Bali dan Nusa Tenggara maka capaian kinerja P3E Bali & Nusra adalah 100%. Pada komponen kegiatan 1 "Inventarisasi SDALH dan Perhitungan DDDT di Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara" realisasinya yaitu 2 dokumen DDDTLH. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2021 yaitu 2 dokumen maka capaian kinerja P3E Bali & Nusra adalah 100%. Pada komponen kegiatan "Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan inventarisasi dan perhitungan DDDT SDALH di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara" realisasinya yaitu 3 pemda. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2021 yaitu 3 pemda maka capaian kinerja P3E Bali & Nusra adalah 100%.

Dokumen Status Daya Dukung Air dan Pangan Pulau Bali merupakan bahan masukan dalam penyusunan RPPLH dan KLHS serta perencanaan daerah lainnya terkait sumber daya air dan pangan. Pelaku usaha dan masyarakat manfaat yang akan diperoleh adalah dapat mengetahui bagaimana kondisi riil sumber daya air Pulau Bali dan bagaimana pemanfaatan sumber daya air yang baik. Adapun Pemutakhiran Dokumen DDDT TN Tambora (Jalur Pendakian Doro Ncaga dan Doropeti) dipergunakan sebagai dasar oleh Balai TN Tambora untuk penyusunan rencana pengelolaan kawasan. Fasilitasi Pemda berupa asistensi dan bimbingan kepada pemerintah daerah yang membutuhkan dalam melakukan penyusunan dokumen dan perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup beserta peta indikatifnya bermanfaat bagi penyusunan dokumen KLHD dan RPPLH yang sedianya akan disusun oleh pemerintah daerah. Outcome dari kegiatan fasilitasi yaitu Pemerintah Daerah mampu melaksanakan penyusunan RPPLH yang terdiri dari inventarisasi lingkungan hidup, pengolahan data dan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup, analisis data dan informasi, penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penyusunan muatan RPPLH. Akibat adanya refocusing anggaran dan pandemi, kegiatan fasilitasi tidak dilaksanakan secara aktif dan dilaksanakan apabila ada rekomendasi atau permohonan dari pemerintah daerah.

IKK 2: RENCANA PENGELOLAAN SDA LH DI WILAYAH EKOREGION

Komponen kegiatan pada indikator kinerja kegiatan Rencana Pengelolaan SDA LH di Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara yaitu:

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan SDALH dilaksanakan pada 2 lokus yaitu Pulau Flores (NTT) dan DAS Jangkok (NTB) sehingga menghasilkan 2 (dua) dokumen sebagai berikut:

A. Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pulau Flores Berbasis Daya Dukung Lingkungan Hidup



Tujuan disusunnya dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pulau Flores Berbasis Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah untuk memberikan arahan/bahan masukan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung

bagi pemangku kepentingan di Pulau Flores. Isu lingkungan hidup di wilayah Pulau Flores adalah kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan.

- a. Kabupaten di Pulau Flores agar dapat meningkatkan nilai indeks kualitas tutupan lahan dapat menjadi sebesar 70 dalam 10 tahun.
- b. Kabupaten di Pulau Flores perlu mengupayakan untuk meningkatkan persentase penanganan sampah sebesar 70% dan pengurangan sampah sebesar 30 % sesuai dengan target yang ada dalam dokumen Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah) yang dibuat oleh masing-masing kabupaten.
- c. Rencana pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup (RPSDALH) terhadap penurunan kerusakan lingkungan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH), pembuatan ekoriparian di sepadan sungai, dan revegetasi pemulihan lahan bekas tambang galian C, hal ini juga berpengaruh terhadap peningkatan tutupan Lahan (IKTL) dan juga nilai RTH ADIPURA.
- d. Sedangkan arahan pengelolaan terhadap penurunan laju pencemaran lingkungan terdiri dari pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan sampah berbasis sumber, dan perbaikan sistem pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Akhir (TPA)

B. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lahan di DAS Jangkok Berbasis Daya Dukung Lingkungan Hidup

Tujuan disusunnya dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lahan di DAS Jangkok Berbasis Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu menentukan status mutu air Sungai Jangkok, menganalisis parameter pencemar air yang paling berpengaruh terhadap kualitas air Sungai Jangkok, dan menentukan arahan kebijakan rencana pengelolaan sumber daya air dan lahan di DAS Jangkok berbasis daya dukung lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup di wilayah Jangkok adalah alih fungsi lahan dan penurunan kualitas air sungai.

- a. Sungai Jangkok telah mengalami pencemaran karena beberapa parameter melebihi baku mutu, yaitu BOD, COD, DO, dan E. Coli. Status mutu air di delapan titik (hulu, tengah, hilir)
- b. Sungai Jangkok secara keseluruhan adalah cemar sedang dengan hasil analisis indeks pencemaran antara 6,24 – 9,87. Variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap indeks pencemaran adalah E. Coli dan COD, sehingga pengendalian pencemaran air diharapkan mampu mengikat variabel bebas yang signifikan.
- c. Arahan kebijakan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup disusun dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas air dan pelestarian air tanah di DAS Jangkok. Rencana pengelolaan tersebut meliputi Peningkatan Kualitas Air di DAS Jangkok melalui penetapan kelas air sungai, pembangunan biogas, pembangunan IPAL, dan pertanian terpadu; dan Pelestarian Air Tanah di DAS Jangkok melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan, implementasi LP2B, dan intensifikasi lahan pertanian.

2. Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH ini menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Dokumen RPPLH sangat penting karena dapat memperkuat perencanaan pembangunan baik di wilayah daratan maupun pesisir dan laut di suatu wilayah, namun masih banyak kabupaten/kota di Provinsi NTB khususnya di Pulau Sumbawa yang belum menyusun dokumen RPPLH.

Progres RPPLH yang disusun Prov NTB baru sampai 3 tahap yang dilakukan yaitu inventarisasi data, pengolahan data dan informasi, serta analisis data. Untuk tahap Penentuan Target RPPLH dan Penyusunan Muatan RPPLH masih dalam proses. Kabupaten/kota lingkup Provinsi NTB belum ada yang memiliki dokumen RPPLH. Kendala kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen RPPLH secara umum adalah tidak tersedianya anggaran. P3E Bali Nusra diminta untuk melakukan audiensi dengan pimpinan lingkup Kabupaten Bima (Bupati, anggota DPRD, dan para kepala dinas) agar penyusunan dokumen RPPLH dan pengelolaan sampah menjadi indikator keberhasilan kinerja pimpinan daerah, sehingga mendapatkan alokasi anggaran yang cukup. Pemerintah Daerah yang difasilitasi diantaranya Kota Bima, Kabupaten Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Dompu yang belum membuat dokumen RPPLH dan masih memerlukan pendampingan dalam penyusunan RPPLH.

Analisis Capaian Kinerja

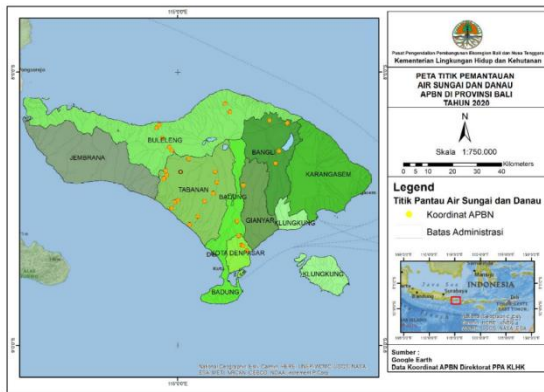
Pada Indikator Kinerja "Rencana Pengelolaan SDA LH di Wilayah Ekoregion", berdasarkan, berdasarkan capaian kinerja per komponen kegiatan maka capaian kinerja IKK 2 Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara adalah 133%. Pada komponen kegiatan 1 "Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara" realisasinya yaitu 2 Dokumen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2021 yaitu 2 dokumen maka capaian kinerja P3E Bali & Nusra adalah 100%. Pada komponen kegiatan 2 "Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara" realisasinya yaitu 5 pemda (166%).

Rangkaian kegiatan penyusunan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi NTB dan NTT tahun 2021 menghasilkan outcome yaitu digunakannya data hasil analisis dalam dokumen RPSDALH DAS Jangkok dan Pulau Flores sebagai dasar acuan penyesuaian kegiatan pembangunan dan menentukan arahan kebijakan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berbasis pada daya dukung lingkungan. Dengan adanya fasilitasi penyusunan RPPLH, Pemerintah daerah mampu melaksanakan penyusunan RPPLH yang terdiri dari inventarisasi lingkungan hidup, pengolahan data dan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup, analisis data dan informasi, penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penyusunan muatan RPPLH. RPPLH selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan RPJP, RPJM dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

IKK 3: HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LHK DAN PENERAPAN PROGRAM STRATEGIS LHK

Komponen kegiatan pada indikator kinerja kegiatan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK terdiri dari:

1. Evaluasi Pengelolaan SDALH



Kegiatan evaluasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu koordinasi dan konsultasi, pengumpulan data, kegiatan pertemuan, analisis data, pengolahan data dan informasi, penyusunan dokumen dan laporan. Kegiatan pertemuan dilaksanakan secara offline dan online (zoom meeting) di Provinsi Bali, NTB dan NTT. Data dan

informasi digunakan dalam pelaksanaan evaluasi adalah data primer dan data sekunder. Data terkait pengelolaan SDALH merupakan hasil dari pengiriman kuisisioner ke Kab / Kota di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara serta data target IKLH.

Evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ini disusun untuk mengetahui hasil pelaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara berdasarkan kualitas lingkungan.

a. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa kualitas air sungai tahun 2020 di Provinsi Bali, Provinsi NTB dan Provinsi NTT dalam kategori sedang. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebab yaitu:

- Adanya keterbatasan anggaran untuk melakukan pemantauan yang berakibat semakin berkurangnya periode pemantauan serta parameter yang dipantau.
- Kualitas air yang menurun disebabkan meningkatnya aktifitas masyarakat di sekitar sungai. Tanpa diikuti upaya pengelolaan limbah yang dibutuhkan.
- Untuk meningkatkan kualitas air yang menurun perlu dilakukan solusi nyata, namun sebelumnya perlu dilakukan identifikasi sumber pencemar sehingga program dan/atau kegiatan yang akan dilakukan dapat tepat sasaran dan optimal.
- Perlu dilakukan edukasi terhadap masyarakat serta penerapan kebijakan/peraturan terkait pembuangan limbah ke sungai yang diijinkan.
- Perlu dilakukan penetapan kelas air. Dokumen Evaluasi PSDALH di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara – 2021 120

- b. Parameter – parameter yang menjadi penyumbang terhadap perubahan kualitas air di Bali tahun 2020 diantaranya BOD, total fosfat, Fecal Coliform.
- c. Parameter yang menjadi penyumbang terhadap perubahan kualitas air di Provinsi NTB adalah parameter Fecal Coliform .
- d. Parameter yang menjadi penyumbang terhadap perubahan kualitas air di Provinsi NTT adalah parameter Fecal Coliform .
- e. Nilai IKU Provinsi Bali, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT tahun 2020 masuk dalam kategori “Baik”.
- f. Nilai IKL Provinsi Bali tahun 2020 masuk dalam kategori “buruk”.
- g. Nilai IKL Provinsi NTB dan Provinsi NTT tahun 2020 masuk dalam kategori “sedang”.
- h. Nilai IKAL Provinsi Bali tahun 2020 yaitu 69.75 dimana masuk dalam kategori “sedang”.
- i. Parameter yang menjadi penyumbang terhadap perubahan kualitas air laut di Provinsi Bali adalah parameter TSS dan Ortofosfat.
- j. Nilai IKAL Provinsi NTB tahun 2020 yaitu 67.49 dimana masuk dalam kategori “sedang”.
- k. Parameter yang menjadi penyumbang terhadap perubahan kualitas air laut di Provinsi NTB adalah parameter TSS, DO dan Ortofosfat.
- l. Nilai IKAL Provinsi NTT tahun 2020 yaitu 70.14 dimana masuk dalam kategori “baik”.
- m. Parameter yang menjadi penyumbang terhadap perubahan kualitas air laut di Provinsi NTT adalah parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, serta Ortofosfat.

2. Pemantauan Kualitas Lingkungan

Kondisi kualitas lingkungan hidup dapat diketahui melalui nilai indeks kualitas lingkungan hidup yang diperoleh dari hasil pemantauan kualitas lingkungan. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan dapat menghasilkan ketersediaan data dan informasi kualitas lingkungan yang didukung oleh laboratorium pengujian kualitas lingkungan. Laboratorium pengujian kualitas lingkungan merupakan aset bagi pengelolaan lingkungan secara khusus. Sehingga, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara (P3E Bali Nusra) akan mendorong pengembangan laboratorium daerah di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara serta menguatkan dan mengembangkan laboratorium lingkungan di P3E Bali dan Nusa Tenggara dalam

a. Tindak Lanjut IKLH

- 1) Membantu sinergitas antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai target IKLH, baik secara nasional maupun daerah;
- 2) Menjembatani koordinasi dan sinergitas pemantauan kualitas antara Pusat, P3E Bali Nusra, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemantauan kualitas air;
- 3) Membantu penetapan target IKLH oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari Rakernis Penetapan Target IKLH 2021 – 2024 di wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara yang diselenggarakan pada Maret 2021;
- 4) Melakukan pendampingan dan asistensi Pemerintah Daerah di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dalam pengisian aplikasi IKLH;
- 5) Membantu Pemerintah Daerah terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengisian aplikasi IKLH untuk berkonsultasi secara langsung dengan developer aplikasi IKLH sehingga meminimalisir kendala dan kerancuan dalam pengisian aplikasi IKLH.

b. Tindak Lanjut Pengelolaan Danau di Provinsi Bali

- 1) Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, Buleleng dan Tabanan dalam melakukan pengelolaan danau;
- 2) Turut aktif dalam memberikan data terkait Danau Batur sebagai bahan masukan dalam penyelamatan Danau Batur yang dilakukan lintas kementerian dan Pemerintah Daerah;
- 3) Turut serta dan aktif dalam menindaklanjuti penataan Kawasan dan rencana pembangunan sempadan Danau Batur;
- 4) Menjembatani antara Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam pengelolaan Danau Batur

Selain dari tindak lanjut yang telah menjadi program dan kegiatan sebagaimana merupakan tindak lanjut hasil evaluasi, P3E Bali Nusra juga melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang bersifat kasuistis seperti dugaan tumpahan minyak di Pantai Saba dan Pantai Purnama dan dugaan timbulan minyak di tanah warga disekitar Pertamina Manggis. P3E Bali Nusra membantu untuk memberikan data awal dengan pengujian dan tinjauan lapangan terhadap dugaan yang terjadi.

Analisis Capaian Kinerja

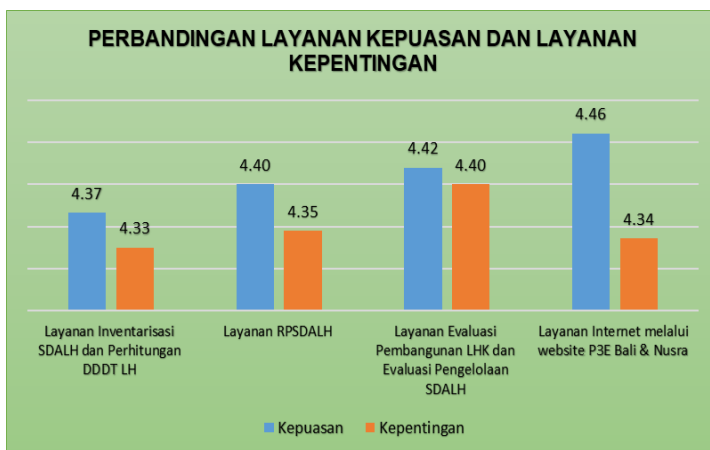
Pada indikator kinerja “Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK”, berdasarkan capaian kinerja per komponen kegiatan maka capaian kinerja IKK 3 Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara adalah 100%. Pada komponen kegiatan 1 “Evaluasi Pengelolaan SDA LH” realisasinya yaitu 1 dokumen evaluasi. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2021 yaitu 1 dokumen maka capaian kinerja P3E Bali & Nusra adalah 100%. Pada komponen kegiatan 2 “Pemantauan Kualitas Lingkungan” realisasinya yaitu 1 Laporan sesuai dengan target yang ditetapkan tahun 2021 yaitu 1 Laporan sehingga capaian kinerja P3E Bali & Nusra adalah 100%. Pada komponen kegiatan 3 “Tindak Lanjut Hasil Evaluasi” target P3E Bali & Nusra tahun 2021 yaitu 1 Dokumen dan Realisasinya adalah 1 Dokumen sehingga capaian kinerja P3E Bali & Nusra untuk komponen kegiatan 3 IKK 3 adalah 100%.

Evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara menghasilkan informasi dan data pengelolaan SDALH di wilayah ekoregion Bali dan Nusa Tenggara yang dapat dimanfaatkan oleh Unit Kerja KLHK terkait dan Pemerintah Daerah se-Provinsi Bali, NTB dan NTT. Koordinasi pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan akan memberikan persamaan persepsi bagi daerah dalam pemantauan kualitas lingkungan dan sinkronisasi data titik pemantauan. Pemantauan kualitas lingkungan menghasilkan data kualitas lingkungan (kualitas air danau, sungai dan air laut) yang datanya dapat dimanfaatkan pemda dalam penentuan pencapaian target IKLH. Pertemuan Pendampingan Pemda dalam rangka Tindak Lanjut PSDALH Danau di Provinsi Bali memberikan informasi perkembangan terkini penanganan dan fencana aksi serta kendala – kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Danau di Provinsi Bali. Dilaksanakan juga Asistensi Teknis Pengisian Aplikasi IKLH sehingga Aplikasi Perhitungan IKLH dipergunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan di wilayah ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

IKK 4: TINGKAT KEPUASAN PUBLIK TERHADAP LAYANAN P3E

Pengarustamaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 menuju Birokrasi berpelayanan prima, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara (P3E BaliNusra) KLHK mencantumkan kinerja tingkat kepuasan layanan publik yang disurvei secara berkala. Survey dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner kepada instansi terkait lingkup provinsi dan kabupaten/kota di wilayah ekoregion bali dan nusa Tenggara pada smester 2 (dua) tahun 2021.

Hasil kuesioner kepuasan dan kepentingan dalam lingkup P3E Bali dan Nusa



Tenggara pada ke 4 (empat) layanan terletak pada skala 4 (4,35 – 4,41) yang berarti bahwa responden telah puas terhadap layanan P3E BaliNusra, namun ada beberapa komponen perlu dilakukan peningkatan agar lebih baik lagi kedepan. Nilai ekspresi

tingkat kepuasan layanan yang diberikan oleh responden dari ke 4 (empat) layanan di P3E Bali dan Nusa Tenggara sebesar 4,41 (puas) dan nilai persepsi terhadap kepentingan layanan sebesar 4,35 (puas). Dari survey yang dilaksanakan dengan menyebarkan kuisisioner, terdapat masukan/ saran dari responden. Masukan-masukan respoden yang terkait diperlukan untuk ditindaklanjuti sebagai acuan bagi langkah kedepan sesuai dengan kebutuhan serta meningkatkan perbaikan



kinerja layanan P3E Bali dan Nusa Tenggara.

Analisis Capaian Kinerja

Pada indikator kinerja “Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E”, berdasarkan hasil survey Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Bali & Nusra dengan kuisisioner maka capaian kinerja P3E Bali & Nusra adalah 109%. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E pada Semester II tahun 2021 yaitu 4.38 Poin. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2021 yaitu 4 Poin maka capaian kinerja P3E Bali & Nusra adalah 109%. Survey tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E ini dapat mengukur sejauh mana kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh P3E Bali dan Nusa Tenggara dan juga Pemerintah daerah dapat memberikan masukan-masukan yang dapat ditindaklanjuti, sehingga P3E Bali dan Nusa Tenggara dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

Adapun output dan outcome kegiatan P3E Bali dan Nusa Tenggara tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Output dan Outcome Indikator Kinerja Kegiatan P3E Bali dan Nusa Tenggara

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Lokus Kegiatan	Outcome / Manfaat
01- Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di ekoregion Bali - Nusa Tenggara	01-Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah Ekoregion	2 Dokumen	2 Dokumen	Perhitungan Status Daya Dukung Air Pulau Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi pemerintah dan pemerintah daerah manfaat yang akan diperoleh adalah sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPPLH dan KLHS serta perencanaan daerah lainnya terkait sumber daya air - Bagi pelaku usaha dan masyarakat manfaat yang akan diperoleh adalah dapat mengetahui bagaimana kondisi riil sumber daya air Pulau Bali dan bagaimana pemanfaatan sumber daya yang baik.
				DD WISATA TN TAMBORA	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar Balai TN Tambora untuk penyusunan rencana pengelolaan kawasan. - Dasar bagi Pemda untuk pengendalian pemanfaatan ruang dan perencanaan pengelolaan LH.

	02-Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion	2 Dokumen	2 Dokumen	RPSDALH di Pulau Flores	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk dimanfaatkan dalam penyusunan RTRW Masing-masing Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagakeo, Ende, Dan Kabupaten Flores Timur - Untuk pengendalian kerusakan lahan di Pulau Flores
				RPSDALH DAS Jangkok di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen dimanfaatkan untuk penyusunan Rencana Pengendalian Pencemaran Air DAS Jangkok - Untuk Penyusunan RPPLH Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat - Peningkatan Kualitas dan Sumber Daya Air dan lahan DAS Jangkok
	03-Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi dan data pengelolaan SDALH di wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara yang dapat dimanfaatkan oleh Unit Kerja KLHK terkait, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, Pemerintah
				Pemantauan Kualitas Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data kualitas lingkungan (kualitas air danau, sungai dan air laut) di wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara
				Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan aplikasi perhitungan IKLH sebagai acuan perencanaan pembangunan di wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara
	04- Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	4 poin	4,38 Poin	Hasil Survey kepuasan Provinsi Bali, NTB dan NTT	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai Indikator dan Bahan Evaluasi Kinerja P3E Bali Nusra

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KOMPONEN KEGIATAN TAHUN 2021

Sesuai dengan Renja 2021 yang telah dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, maka capaian kinerja pada elemen kegiatan, sebagaimana pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Komponen Kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusra 2021

No	Output dan Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah						
1	Pelaksanaan Inventarisasi SDALH dan Perhitungan DDDT di Wilayah Ekoregion BaliNusra	Terinventarisasi dan terhitungnya Daya Dukung dan Daya Tampung SDALH di wilayah ekoregion BaliNusra	Jumlah dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung SDALH di ekoregion Balinusra	2 Dokumen	3 Dokumen	100%
2	Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan inventarisasi dan perhitungan DDDT SDALH di Ekoregion Bali dan Nusra	Terfasilitasinya pemerintah daerah dalam penyusunan DDDT SDALH di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Pemerintah Daerah yang menyusun DDDT SDALH	3 Pemda	3 Pemda	100%
3	Penyusunan Rencana pengelolaan SDALH di Ekoregion BaliNusra	Tersusunya rencana pengelolaan SDALH di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah rencana pengelolaan SDALH di ekoregion BaliNusra	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusra	Terlaksananya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Pemerintah Daerah yang menyusun perencanaan pembangunan (RPPLH dan KLHS) berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusra	3 Pemda	5 Pemda	166%
5	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra	Terlaksananya pengumpulan dan analisis data informasi bahan evaluasi pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra	Data dan informasi pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	Pemantauan kualitas lingkungan	Terlaksananya pemantauan kualitas Ekoregion BaliNusra	Jumlah lokasi yang dipantau	1 Laporan	1 laporan	100%

7	Tindak lanjut hasil evaluasi	Terlaksananya tindak lanjut pengelolaan SDA dan LH di ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah hasil evaluasi yang ditindak lanjuti dalam pengelolaan SDALH	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8	Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3e Bal & Nusra	Terlaksananya survei tingkat kepuasan layanan terhadap kegiatan P3E BaliNusra	Adanya data hasil survei tingkat kepuasan layanan terhadap kegiatan P3E BaliNusra	4 Poin	4.38 Poin	109%
Layanan Dukungan Manajemen Satker						
1	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi program dan anggaran di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Dokumen RENSTRA P3E Bali & Nusra 2020-2024	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Jumlah Dokumen RENJA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Jumlah Dokumen TOR dan RKAKL	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Jumlah Dokumen KRISNA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Jumlah Laporan LKj	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Jumlah Laporan Triwulan P39 Bapenas	4 Laporan	4 Laporan	100%
			Jumlah Laporan Bulanan RKA	12 Laporan	12 Laporan	100%
			Jumlah Laporan RKA	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan DBH DR, DAK dan kegiatan lainnya	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan DBH DR, dan DAK LHK	2 Laporan	1 Laporan	50%
3	Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien	Jumlah laporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%
4	Pengelolaan Kepegawaian	Terlaksananya peningkatan pengelolaan kepegawaian dilingkup P3E BaliNusra	Jumlah laporan kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan	100%
5	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Terlaksananya penataan layanan umum & perlengkapan	Jumlah laporan BMN	2 Laporan	2 Laporan	100%
			Jumlah laporan kehumasan	1 Laporan	1 Laporan	100%

			Jumlah Laporan Diseminasi Kegiatan P3E Bali Nusra di Provinsi Bali, NTB dan NTT	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Jumlah laporan Pengarusutamaan Gender	1 Laporan	1 Laporan	100%
Layanan Sarana Internal						
2	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Terlaksananya pengadaan peralatan dan fasilitas perkaontoran	Jumlah unit peralatan dan fasilitas perkantoran	41 Unit	41 Unit	100%
Layanan Perkantoran						
1	Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Terlaksana kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	12 Layanan	12 Layanan	100%
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatnya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terlaksananya operasional perkantoran (PDAM, Tlp, Listrik, ATK dan lainnya).	12 Layanan	12 Layanan	100%
			Terlaksananya pemeliharaan perkantoran (komputer, AC, taman, kendaraan, dan lainnya)	12 Layanan	12 Layanan	100%

Berdasarkan tabel capaian kinerja indikator komponen kegiatan diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja indikator komponen kegiatan di Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara adalah sebesar 100,9%. Di masa pandemic Covid – 19 dan dengan adanya *refocusing* dan realokasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah, Kinerja P3E Bali Nusra lebih dari 100% meskipun salah kegiatan yaitu Pemantauan DBHDR tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran ini. Capaian ini juga didukung dengan perpaduan cara kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. Uraian capaian kinerja per komponen kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Capaian Komponen Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi SDALH dan Perhitungan DDDT di Wilayah Ekoregion BaliNusra tahun 2021 yaitu 2 Dokumen (100%) yang dilaksanakan di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Dokumen tersebut yaitu

- Status Daya Dukung Air Pulau Bali, Status Daya Dukung Pangan Pulau Bali, dan Pemutakhiran Daya Dukung Wisata Taman Nasional Tambora.
2. Capaian Komponen Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan inventarisasi dan perhitungan DDDT SDALH di Ekoregion Bali dan Nusra adalah 3 Pemda (100%) yang dilaksanakan di Provinsi Bali. Pemerintah daerah yang difasilitasi yaitu Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung dan Kabupaten Jembrana.
 3. Capaian Kinerja Komponen Kegiatan Penyusunan Rencana pengelolaan SDALH di Ekoregion BaliNusra adalah 2 Dokumen (100%), yang dilaksanakan di Provinsi NTB dan NTT. Dokumen yang dihasilkan yaitu dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Flores Timur dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lahan DAS Jangkok.
 4. Capaian Kinerja Komponen Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusra adalah 5 Pemda (166%). Fasilitasi Pemda dilaksanakan sekaligus di provinsi NTB. Pemerintah Daerah yang difasilitasi diantaranya Kota Bima, Kabupaten Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Dompu.
 5. Capaian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra yaitu 1 Dokumen (100%). Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa kualitas air sungai tahun 2020 di Provinsi Bali, Provinsi NTB dan Provinsi NTT dalam kategori sedang. Nilai IKU Provinsi Bali, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT tahun 2020 masuk dalam kategori "Baik". Nilai IKL Provinsi Bali tahun 2020 masuk dalam kategori "buruk". Nilai IKL Provinsi NTB dan Provinsi NTT tahun 2020 masuk dalam kategori "sedang". Nilai IKAL Provinsi Bali tahun 2020 yaitu 69.75 dimana masuk dalam kategori "sedang". Nilai IKAL Provinsi NTB tahun 2020 yaitu 67.49 dimana masuk dalam kategori "sedang" serta Nilai IKAL Provinsi NTT tahun 2020 yaitu 70.14 dimana masuk dalam kategori "baik".
 6. Pemantauan kualitas lingkungan yang dilaksanakan yaitu pemantauan status air di 4 Danau Provinsi Bali (Batur, Buyan, Beratan dan Tamblingan), status air sungai badung hilir dam Tombang Tengah, serta pemantauan kualitas air laut. Pengujian dilaksanakan di laboratorium P3E Bali Nusra yang selanjutnya hasil pemantauan berupa 1 laporan sehingga capaian kinerja komponen kegiatan 100%.
 7. Capaian Kinerja Komponen Kegiatan Tindak lanjut hasil evaluasi yaitu 1 Dokumen (100%). Pada Tahun 2021 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi yang telah dilakukan difokuskan pada tindak lanjut Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) yang pada Pemerintah Daerah di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dan Tindak Lanjut

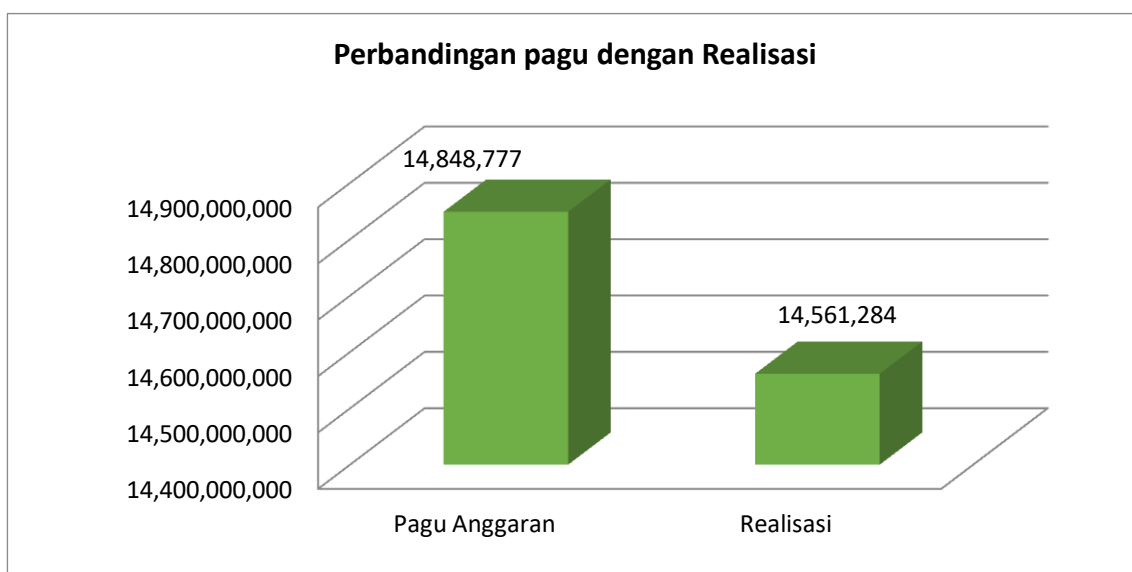
Pengelolaan Danau di Provinsi Bali. Pertemuan Pendampingan Pemda dalam rangka Tindak Lanjut PSDALH Danau di Provinsi Bali memberikan informasi perkembangan terkini penanganan dan fencana aksi serta kendala – kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Danau di Provinsi Bali. Dilaksanakan juga Asistensi Teknis Pengisian Aplikasi IKLH sehingga Aplikasi Perhitungan IKLH dipergunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan di wilayah ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

8. Capaian Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Bali & Nusra adalah 4,38 poin (109%). Hal ini menunjukkan bahwa responden puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh P3E Bali dan Nusa Tenggara. Terdapat juga beberapa masukan dari responden yang dapat dipergunakan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.
9. Capaian Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran adalah 100%. Dokumen/ laporan yang dihasilkan yaitu Renstra 2020-2024 (revisi),
10. Capaian Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi yaitu 1 laporan pemantauan dan evaluasi DAK (50%). Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pemantauan dan evaluasi DAK serta DBHDR. Pada tahun 2021, Pemantauan dan Evaluasi DBHDR tidak terlaksana dikarenakan adanya refocusing anggaran ditengah pandemic Covid-19.
11. Capaian Pengelolaan Keuangan yaitu 100%. Laporan keuangan yang dihasilkan yaitu laporan keuangan semester I dan Laporan Keuangan Semester II
12. Capaian Pengelolaan kepegawaian yaitu 100%. Laporan pengelolaan kepegawaian dilaksanakan secara berkala selama 12 bulan.
13. Capaian Pelayanan Umum dan Perkantoran adalah 100%. Laporan yang dihasilkan yaitu Laporan BMN Semester I dan II, Laporan Kehumasan, laporan diseminasi dan pengarusutamaan gender.
14. Capaian Pengadaan Peralatan fasilitas Perkantoran sejumlah 41 unit (100%). Pengadaan berupa Laptop, PC, Printer, AC, dan Ipad.
15. Capaian Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan adalah 100%. Pembayaran gaji dan tunjangan telah dilaksanakan 12 kali untuk bulan Januari - Desember 2021.
16. Capaian Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran adalah 100%. Telah dilaksanakan pembayaran listrik, PDAM, Wifi, Atk dll secara berkala dan pelaksanaan pemeliharaan perkantoran.

3.3 KINERJA ANGGARAN P3E BALI DAN NUSA TENGGARA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja maka telah ditetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021. DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Anggaran untuk Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara mengalami *recofusing* dan realokasi belanja dalam rangka penanganan *Covid-19* menjadi Rp 14.848.777.000,- Adapun realisasi anggaran P3E Bali dan Nusa Tenggara tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

Total pagu anggaran Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara tahun 2021 sebesar Rp 14.848.777.000,- termasuk didalamnya anggaran untuk renovasi pasca kebakaran tanggal 19 maret 2021. Realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp 14.561.284,581 atau sebesar 98,06%. Realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya yaitu 98,80%. Hal ini terjadi salah satunya karena anggaran gaji dan tunjangan untuk Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara tidak dapat direalisasikan.



Analisis Efisiensi Penggunaan anggaran

Berdasarkan capaian realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan *input* yaitu persentasi realisasi anggaran dengan *output* yaitu capaian kerjanya. Dalam hal ini, capaian kinerja P3E Bali & Nusra sebesar Tahun Anggaran 2021 adalah 100,9% dengan realisasi anggaran sebesar 98.06% atau rasio sebesar 0,94. Rasio kurang dari satu menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, dimana Realisasi kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran. Anggaran yang dikeluarkan telah dimanfaatkan dengan baik untuk pencapaian target kinerja berupa *output* dan *outcome*-nya.

Uraian secara detail realisasi anggaran tahun 2021 Satuan Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dapat dilihat dalam tabel 7.

Tabel 7. Rekap Realisasi anggaran pada satker Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	%
WA	Program Dukungan Manajemen	14,848,777,000	14,561,284,187	287,492,813	98.06%
5374	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	14,848,777,000	14,561,284,187	287,492,813	
5374.EAA	Layanan Perkantoran	10,342,182,000	10,066,565,352	275,616,648	97.34%
001	Gaji dan Tunjangan Pegawai P3E Bali Nusra	6,256,572,000	5,986,422,946	270,149,054	95.68%
002	Layanan Operasional dan Pemeliharaan P3E Bali Nusra	4,085,610,000	4,080,142,406	5,467,594	99.87%
5374.EAC	Layanan Umum	914,795,000	909,964,950	4,830,050	99.47%
001	Layanan dukungan manajemen satuan kerja P3E Bali	914,795,000	909,964,950	4,830,050	99.47%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	34,221,000	34,221,000	-	

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	%
A	PENYUSUNAN RENCANA KERJA P3E BALI NUSRA DALAM APLIKASI KRISNA	300,000	300,000	-	
G	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	535,000	535,000	-	
J	PENGELOLAAN KEUANGAN	33,386,000	33,386,000	-	
051	Layanan dukungan manajemen satuan kerja P3E Bali	880,574,000	875,743,950	4,830,050	99.45%
A	PENYUSUNAN RENCANA KERJA P3E BALI NUSRA DALAM APLIKASI KRISNA	30,234,000	30,234,000	-	100.00%
B	PENYUSUNAN RKA K/L	57,505,000	57,505,000	-	100.00%
C	REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN	30,036,000	30,035,600	400	100.00%
D	PENYUSUNAN RENSTRA P3E BALI NUSRA	41,652,000	41,652,000	-	100.00%
E	PENGARUSUTAMAAN GENDER	20,300,000	20,300,000	-	100.00%
F	PENYUSUNAN LKj P3E BALI NUSRA	12,599,000	12,598,350	650	99.99%
G	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	71,778,000	71,770,200	7,800	99.99%
H	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN BADAN MILIK NEGARA (BMN)	51,190,000	51,148,000	42,000	99.92%
I	PENYUSUTAN ARSIP INAKTIF	17,884,000	17,883,300	700	100.00%
J	PENGELOLAAN KEUANGAN	105,170,000	104,956,100	213,900	99.80%
K	RAPAT KOORDINASI KEGIATAN DLM RGK IMPLEMENTASI PERMEN LHK NO.P35 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENLHK SBG	34,450,000	34,130,000	320,000	

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	%
	PENGGUNA ANGGARAN BARANG DI PROV. BALI P3E DAN KEPALA U				
M	DESIMINASI KEGIATAN PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA DI PROV. BALI, NTB DAN NTT	192,193,000	190,785,400	1,407,600	
N	KEHUMASAN P3E BALI NUSRA	108,340,000	108,325,000	15,000	
P	MONITORING DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI, DAK DAN DEKON DI PROVINSI BALI, NTB DAN NTT	88,202,000	86,307,800	1,894,200	
Q	PELAKSANAAN SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN)	17,241,000	16,313,200	927,800	
R	DALAM RANGKA SOSIALISASI PENGEMBANGAN WHISTLE BLOWING	1,800,000	1,800,000	-	
5374.EAD	Layanan Sarana Internal	1,199,740,000	1,199,738,100	1,900	100.00%
001	Layanan Sarana Internal P3E Bali-Nusra	1,199,740,000	1,199,738,100	1,900	100.00%
5374.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	2,392,060,000	2,385,015,785	7,044,215	99.71%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	253,752,000	253,703,930	48,070	99.71%
051	Inventarisasi SDALH dan Perhitungan DDDT	646,277,000	641,029,250	5,247,750	99.19%
A	INVENTARISASI DAN PENYUSUNAN DDDT SDALH	646,277,000	641,029,250	5,247,750	
052	Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Inventarisasi SDALH dan Perhitungan DDDT	72,573,000	72,572,800	200	100.00%
A	FASILITASI PENYUSUNAN DDDT DI DAERAH	72,573,000	72,572,800	200	
053	Penyusunan Rencana SDALH	512,623,000	511,843,560	779,440	99.85%
A	PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN SDALH BERDASARKAN DDDT				

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	%
		512,623,000	511,843,560	779,440	
054	Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Rencana Pembangunan berdasar DDDT	68,886,000	68,489,800	396,200	99.42%
A	FASILITASI PEMDA DALAM PENYUSUNAN RPPLH	68,886,000	68,489,800	396,200	
055	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK di Ekoregion Bali Nusra	123,098,000	123,097,245	755	100.00%
A	EVALUASI PENGELOLAAN SDALH	123,098,000	123,097,245	755	
056	Pemantauan Kualitas Lingkungan	159,540,000	159,382,300	157,700	99.90%
A	PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN	159,540,000	159,382,300	157,700	
057	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	496,671,000	496,431,000	240,000	99.95%
A	TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI	95,751,000	95,511,000	240,000	
B	PENINGKATAN KAPASITAS SDM DALAM RANGKA PSDALH P3EBN	400,920,000	400,920,000	-	
058	Survey Kepuasan Layanan Publik	58,640,000	58,465,900	174,100	99.70%
M	DESIMINASI KEGIATAN PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA DI PROV. BALI, NTB DAN NTT	1,440,000	1,440,000	-	
N	Kehumasan P3E Bali Nusra	7,680,000	7,680,000	-	
O	EVALUASI DAN SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN P3E BALI NUSRA	960,000	960,000	-	

A dramatic sunset over a body of water. The sky is filled with large, dark clouds, some of which are illuminated from below by the setting sun, creating a vibrant orange and yellow glow. The sun is partially obscured by the clouds, creating a soft, diffused light. The water in the foreground is dark, with the sun's reflection creating a shimmering path of light. In the foreground, a wooden pier or dock extends into the water, with a railing. The overall mood is serene and contemplative.

BAB IV PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 merupakan gambaran capaian indikator kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Kegiatan 1 yaitu "Hasil Inventarisasi dan Perhitungan DDDT LH di Wilayah Ekoregion". Capaian Kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara adalah 100%. Dokumen hasil inventarisasi dan perhitungan DDDT di wilayah ekoregion Bali dan Nusa Tenggara yaitu 2 dokumen (Daya Dukung Status Air Pulau Bali dan Pemutakhiran Dokumen Daya Dukung Wisata Taman Nasional Tambora)
2. Indikator Kinerja Kegiatan 2 yaitu "Rencana Pengelolaan SDA LH di Wilayah Ekoregion". Capaian kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara adalah 133% dengan 2 dokumen (Dokumen RPSDALH Pulau Flores dan Dokumen RPSDALH DAS Jangkok – Nusa Tenggara Barat)
3. Indikator Kinerja Kegiatan 3 yaitu "Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK". Capaian Kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara untuk IKK 3 tahun 2020 adalah 100%. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dan penerapan program strategis LHK di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dapat diketahui bahwa kualitas air sungai tahun 2020 di Provinsi Bali, Provinsi NTB dan Provinsi NTT dalam kategori sedang. Nilai IKL Provinsi Bali tahun 2020 masuk dalam kategori "buruk". Nilai IKL Provinsi NTB dan Provinsi NTT tahun 2020 masuk dalam kategori "sedang". Nilai IKAL Provinsi Bali tahun 2020 yaitu 69.75 dimana masuk dalam kategori "sedang". Nilai IKAL Provinsi NTB tahun 2020 yaitu 67.49 dimana masuk dalam kategori "sedang". Nilai IKAL Provinsi NTT tahun 2020 yaitu 70.14 dimana masuk dalam kategori "baik".
4. Indikator Kinerja Kegiatan 4 "Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E". Berdasarkan hasil survey Tingkat Kepuasan Publik dan Nilai Persepsi Kepentingan terhadap Layanan P3E Bali & Nusra dengan menggunakan kuisioner maka diporeleh hasil 4,38 poin. Jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yaitu 4 poin maka capaian

kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara adalah 109%. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa responden merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh P3E Bali & Nusa Tenggara dengan beberapa masukan untuk peningkatan pelayanan di masa yang akan datang.

5. Secara Keseluruhan capaian kinerja P3E Bali & Nusra tahun 2021 sebesar 104% dengan realisasi anggaran sebesar 98,06% atau rasio sebesar 0,94. Tingkat rasio kurang dari 1 (satu) menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien untuk mencapai target kinerja dan outcome.

3.2 SARAN TINDAK LANJUT

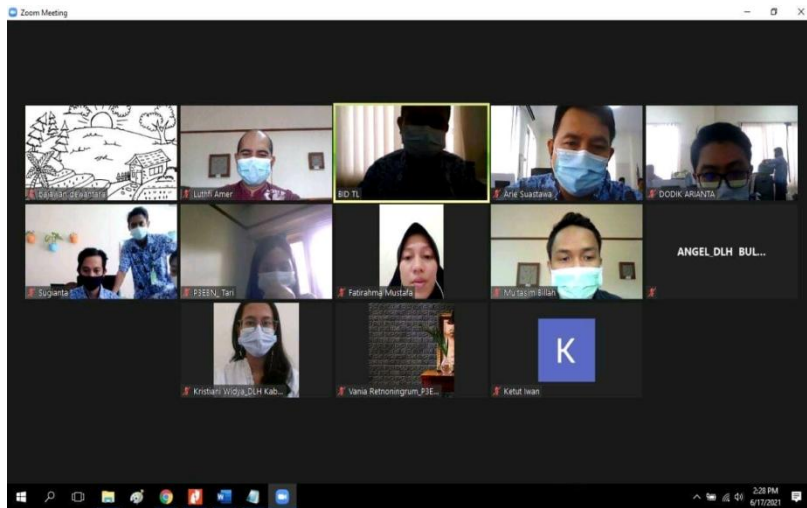
Berdasarkan pemaparan diatas tentang capaian kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. SDM dan anggaran yang terbatas, diupayakan dapat memaksimalkan setiap perencanaan kegiatan sehingga dapat menghasilkan output yang jelas dan sesuai dengan target dalam Rencana Kerja Tahunan. SDM yang ada dioptimalkan dengan system pembagian tugas yang merata dan sesuai dengan kompetensinya.
2. Pemerintah Daerah harus melaksanakan pemantauan kualitas udara dan air secara regular dan konsisten sesuai dengan petunjuk teknis pemantauan kualitas lingkungan, agar diperoleh data series yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Setiap daerah perlu melakukan peningkatan tutupan hutan dan lahan dengan menambah luas lahan yang memiliki vegetasi/tutupan pohon. Hal ini dapat ditempuh dengan menghutankan kawasan hutan yang tutupan hutannya masih rendah, melakukan reboisasi serta mengendalikan alih fungsi hutan.
4. Masih perlu dilakukan peningkatan upaya pengelolaan kawasan konservasi di beberapa kawasan yang ada di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara sehingga fungsinya sebagai penyangga prikehidupan masyarakat di sekitarnya dapat berjalan optimal.
5. Perlu ada kesepakatan antara pemangku kepentingan dalam menetapkan isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan SDA dan LH dimasing-masing provinsi di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara guna untuk menetapkan rencana penyusunan pengelolaan SDA dan LH mendatang, sehingga dokumen yang dihasilkan dapat diterapkan oleh pemangku kepentingan.

6. Dokumen kajian yang dihasilkan sejak tahun 2015-2020, baik dokumen DDDTLH maupun dokumen RPSDALH diharapkan dapat memanfaatkan dan diterapkan oleh pemangku kepentingan di masing-masing fokus kegiatan.
7. Diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dengan menjalankan masukan-masukan terkait yang diberikan oleh responden agar P3E Bali & Nusra dapat memberikan kepuasan pelayanan yang lebih baik kepada publik.
8. Berdasarkan hasil masukan dari keseluruhan responden terkait survey kepuasan dan kepentingan ini diperoleh saran/masukan untuk perbaikan layanan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara antara lain:
 - a. Laboratorium yang tidak berfungsi perlu diperhatikan pemanfaatannya dan dapat bantuan dari Dana Pusat;
 - b. Layanan website diaktifkan kembali karena kami kadang masih susah untuk mengunduh data dan pembinaan ke daerah agar semakin intens;
 - c. Komunikasi dan layanan berbasis web lebih diperbanyak lagi sehingga memudahkan disaat kondisi Covid-19. Update data dan Informasi melalui website;
 - d. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan informasi DDDTLH agar lebih ditingkatkan dan hasil kegiatan bisa diterima sebagai bahan perencanaan kedepan;
 - e. Diperlukan agar meningkatkan pelayanan sehingga semakin bermanfaat untuk daerah;
 - f. Agar P3E Bali lebih rutin melakukan pembinaan terhadap setiap proses kegiatan seperti IKLH, KLHS, DDDT dan RPPLH;
 - g. Dengan seterusnya di arahkan koordinasi dan pembinaan kepada Kabupaten/Kota, maka akan mempermudah komunikasi dan tercapainya target yang diinginkan
 - h. Agar lebih intensif melakukan pembinaan ke Kabupaten, terutama dalam penyusunan kajian yang di amanatkan oleg UU NO.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - i. Tingkatkan sistem kerja yang ada sekarang dan tetap profesional;
 - j. Untuk meningkatkan pelayanan, kerjasama, dan penyampaian informasi;

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. FOTO KEGIATAN BIDANG 1



LAMPIRAN 2. FOTO KEGIATAN BIDANG 2



LAMPIRAN 3. FOTO KEGIATAN BIDANG 3





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NI NYOMAN SANTI, ST, M.Sc

Jabatan : Plt. KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI -
NUSA TENGGARA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M

Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dengan sebenar-benarnya yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggungjawab jabatan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M
NIP. 19640930 198903 1 001

Jakarta, Oktober 2021

Pihak Pertama,

NI NYOMAN SANTI, ST, M.Sc
NIP. 19720617 199803 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 REVISI
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI NUSA TENGGARA

Kegiatan (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kegiatan (3)	Target (4)	Satuan (5)
5374. Pengendalian Pembangunan LHK Regional	01-Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kesehatan di Ekoregion Bali – Nusa Tenggara	01-Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah ekoregion	2	Dokumen
		02-Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion	2	Dokumen
		03-Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	1	Dokumen
		04.Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E	4	point

Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)

EAA-Layanan Perkantoran	001-Gaji dan Tunjangan Pegawai P3E Bali Nusra	1	Layanan	6.256.572,00
EAA-Layanan Perkantoran	002-Layanan Operasional dan Pemeliharaan P3E Bali Nusra	1	Layanan	4.085.610,00
EAC-Layanan Umum	001-Layanan dukungan manajemen satuan kerja P3E Bali	1	Layanan	914.795,00
EAD-Layanan Sarana Internal	001-Layanan Sarana Internal P3E Bali-Nusra	41	unit	1.199.740,00
EAE-Layanan Prasarana Internal	001-Layanan Prasarana Internal P3E Bali Nusra	0	unit	0,00
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Balinusra	41	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.392.060,00

Sekretaris Jenderal



Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M
NIP. 19640930 198903 1 001



Jakarta, / Oktober 2021

Plt. Kepala/Pusat Pengendalian Pembangunan
Ekoregion Bali Nusa Tenggara

NI NYOMAN SANTI, ST, M.Sc
NIP. 19720617 199803 2 001